

## ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang pendapat para tokoh ulama tentang perkawinan wanita hamil, yakni perkawinan yang diselenggarakan ketika wanita sedang dalam keadaan hamil. Para ulama madzhab mayoritas memperbolehkan pelaksanaan perkawinan wanita hamil, hanya saja ketentuan dan syarat para ulama berbeda-beda, salah satunya syarat dari pada pelaksanaan perkawinan wanita hamil menurut Ulama Syafi'iyah adalah laki-laki yang harus menikahnya adalah laki-laki yang telah dulu menghamilinya syarat ini sejalan dengan syarat mutlak menurut KHI pasal 53 adalah laki-laki yang wajib menikahi dan di terima permohonan menikahi wanita hamil adalah laki-laki yang sudah menghamilinya, sedangkan pada praktiknya laki-laki mana saja yang siap untuk menjadi istri sekaligus siap menjadi ayah biologis bayi yang dikandungnya adalah di terima. Permohonan pelaksanaan nikah hamil tersebut adalah sesuai keputusan dari Kantor Urusan Agama, tokoh-tokoh masyarakat dan pihak terkait lainnya, keputusan ini sudah turun temurun dilakukan oleh KUA Kecamatan Wanasari beserta masyarakatnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara dengan para tokoh ulama dalam lingkup KUA Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Jawa Tengah. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keputusan Kantor Urusan Agama beserta pihak-pihak terkait dalam memutuskan pelaksanaan perkawinan wanita hamil dilihat dari aspek dan faktor, serta harus terpenuhinya syarat untuk permohonan pelaksanaan perkawinan wanita hamil tersebut, adapun pelaksanaan permohonan yang sudah di sepakati dan diterima oleh KUA Kecamatan Wanasari, di proses melalui bimbingan terlebih dahulu, kemudian pelaksanaanya melihat kondisi kehamilannya, jika kehamilannya masih muda maka apabila memenuhi syarat seketika itulah melalui proses pernikahannya, dan jika hamilnya sudah tua maka perkawinan tersebut dilakukan setelah bayinya dilahirkan. dengan kebijakan dan keputusan tersebut bukan serta merta mengizinkan dan melegalkan perzinahan melainkan memberikan hak atas anak yang dilahirkan setelah melalui beberapa pertimbangan, dan upaya untuk meminimalisir dampak kemadlaratan yang lebih besar yang akan muncul setelahnya.

**Kata kunci: Perkawinan, Perkawinan Wanita Hamil, Wanita Hamil, Hak**

**Perdata Anak**

## ABSTRACT

*Marriage a pregnant woman is marriage held when the woman are pregnant, an important point according to khi article 53 is a male who is obliged to marry and in trust married a woman pregnant is the man who menghamilinya, while in practice between fit in and whereabouts of an application in the implementation of the pregnant marriage own is the decisions from the office of religious affairs, figures other societies and related parties this decision has also declined from generation to generation done by the kecamatan kua wanasari and communities. In this research the use writers qualitative research was conducted by the use of the kind of research the field ( filed research and uses the technique data collection through observation and interviews in the kecamatan kua wanasari kabupaten brebes central java. The result of this research it can be concluded that the decision the office of religious affairs and parties that should be involved in deciding the implementation of marriage a pregnant woman when viewed from the aspect*

**Keywords : Marriage, Marriage of Pregnant Women, Pregnant women, Civil Right Of Children**

